BAB V

K E S I M P U L A N

Sejarah Seni Tari Keraton Yogyakarta serta pembentukan dan perkembangannya dalam masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX pada khususnya perlu didekati secara historis-diakronis, tanpa mengesampingkan peranan pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya. Pendekatan dengan multi dimensi memberikan kesempatan tinjauan totalitas, sehingga menghasilkan suatu eksplanasi yang lebih memuaskan, karena dapat dilihat hubungan atau keterkaitan sebab-sebab suatu peristiwa, korelasi dengan faktor-faktor lain.

Motivasi pembentukan, perkembangan atau perubahan dan dinamika seni tari di keraton menjadi bagian integral dalam masyarakat istana. Mengenai kondisi sosial, kandungan sosial maupun hubungan sosial dalam seni pertunjukan itu sangat diwarnai oleh kultur sosial politik istana. Deskripsi dan analisis mengenai latar belakang pembentukan dan perkembangan seni pertunjukan itu tak lepas dari kondisi-kondisi itu.

Secara historis keberadaan keraton Yogyakarta semenjak pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I sampai Sultan Hamengku Buwono IX, telah melangsungkan pemerintahannya dengan segala aktivitas sosial, religi, dan kulturenya sendiri. Semenjak pemerintahan Sultan Ha-

mengku Buwono IX segala aktivitas itu terwujud dalam suatu orde atau struktur yang mempunyai peraturan hukumnya, kantornya, organisasinya dan sebagainya. Semenjak itu terlihat keraton sebagai pranata sosial yang terwujud dalam sub kultur mempunyai struktur pemerintahan dengan segala aktivitasnya yang sangat kompleks. Dalam struktur itu Sultan sebagai salah satu unsur dalam pemerintahan keraton, merupakan sumber satu-satunya dari segenap kekuatan dan kekuasaan. Dengan demikian kedudukan Sultan yang sentral dalam keraton itu wajar apabila struktur pemerintahan keraton diatur secara terpusat dengan sifat-sifat yang otokratis. Namun demikian sifat-sifat seperti pada jaman kolonial dan jaman kemerdekaan sangat berbeda.¹ Pada jaman kemerdekaan sifat-sifat otokratis seperti di atas dianggap sebagai satu struktur pemerintahan atau struktur rumah tangga keluarga keraton, dengan Sultan berfungsi sebagai kepala keluarganya.

Dalam struktur pemerintahan keraton terdapat unsur-unsur yang menunjukkan segenap tugas untuk mencapai satu tujuan, fungsi serta wewenang dan tanggung jawabnya. Salah satu unsur itu adalah lembaga keabdi-

¹Lihat Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta, terj. H.J. Koesoemanto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), hal. 28-63.

daleman kesenian, yang mengatur segala macam nilai-nilai seni tradisional keraton. Lembaga kesenian itu adalah Kawedanan Hageng Punakawan Kridhamardawa yang menampung para abdi dalem dengan berbagai macam tugas, dari seniman pencipta, pekerja kreatif, pelaku sampai pada pembantu pelaksana seni. Mereka terhimpun dalam satu wadah dengan urutan hirarkis: pimpinan atau pengageng, priyayi, sampai kawula alit, sehingga tercermin hubungan hamba dan tuan (kawula-Gusti). Dalam lembaga kesenian keraton ini segala macam produksi serta distribusi nilai-nilai seni adi luhung akan dihasilkan dan disebarakan, dengan kontrol langsung bersumber pada Sultan.

Sultan Hamengku Buwono IX dengan melaksanakan pembentukan kelembagaan beserta produksi dan distribusi kesenian tradisional keraton, berusaha meneruskan warisan leluhurnya serta sebagai perangkat keabsahan sebagai Sultan. Salah satu bentuk seni pertunjukan yang dihasilkan dan disebarakan seperti Wayang wong merupakan pertunjukan ritual kenegaraan; pertunjukan ini menjadi perangkat legitimasi bersama-sama dengan berbagai bentuk-bentuk seni lainnya, dan berbagai pusaka yang memiliki fungsi yang sama. Di samping arti dan fungsi itu, aktivitas dari bentuk seni tari merupakan salah satu cara yang efektif untuk memelihara persatuan antara Sultan dan kawulanya. Dalam aktivitas seni pertunjukan

itu tercermin ikhtisar pemikiran Jawa tentang hubungan raja dan kawulanya, seperti konsep-konsep hubungan pribadi yang akrab yang disertai oleh perasaan saling mengasihi dan menghormati.²

Perkembangan dari bentuk seni tari di keraton Yogyakarta, terjadi setiap periode kepemimpinan seorang Sultan. Masing-masing Sultan yang berkuasa memiliki naluri dan hasrat untuk senantiasa meneruskan tradisi yang telah ada serta berusaha mengembangkan seperlunya sesuai dengan iklim serta kondisi jamannya. Perkembangan yang terjadi semenjak pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I sampai Sultan Hamengku Buwono VIII merupakan fenomena yang sangat kompleks. Dapat dikatakan gejala perkembangan seni pertunjukan tema sentral dan normanya lebih ditujukan untuk melegitimasi atau mengkeramatkan raja, sehingga bentuk-bentuk simbolisnya kebanyakan masih bersifat sakral. Pengaruh atau akibat nilai-nilai sosial, politik, ekonomi yang terjadi pada masa-masa itu, merupakan inspirasi yang dikaitkan dengan bentuk-bentuk simbolis yang ada. Seperti misalnya puncak-puncak perkembangan pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I dan Sultan Hamengku Buwono V yang diwarnai oleh suasana pergolakan

²Lihat Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina-Negara Di Jawa Masa Lampau (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hal. 31-32.

politik perjuangan melawan penjajah, memberi inspirasi terhadap nilai-nilai penciptaan seni. Puncak-puncak kemewahan pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII, tidak akan lepas dari kondisi serta dukungan pemerintahan kolonial.

Gejala perkembangan seni pertunjukan tari pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX, dimulai sejak tahun 1940. Semenjak tanggal 18 Maret 1940, setelah Gusti Dorojatun bergelar dengan kependekan sebutan Sultan Hamengku Buwono IX, ia mulai memperhatikan makna-makna simbolis seni warisan ayahandanya yang sudah tidak cocok lagi dengan inspirasi jamannya. Faktor-faktor penting yang memungkinkan perubahan, perkembangan maupun kreativitas, adalah suatu kebutuhan sosial yang menghendaki satu bentuk, struktur atau sistem-sistem yang lebih cocok dan memadai kebutuhan. Oleh sebab itu dalam dekade pertama pemerintahannya karena keadaan sosial, ekonomi, dan politik sungguh mengkhawatirkan, sehingga seni pertunjukan tari yang pernah diselenggarakan secara besar-besaran pada jaman pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII, tidak lagi diselenggarakan. Sultan Hamengku Buwono IX-lah yang mulai merintis perubahan dan perkembangan bentuk-bentuk seni. Sungguhpun demikian tidak berarti merubah makna-makna atau nilai-nilai esensialnya atau menuju ke desakralisasi, tetapi gagasan-gagasan yang timbul demi

satu kebutuhan sosial yang ada pada jamannya; Soedarsono (1986) menyebut bentuk-bentuk seni seperti itu bersifat pseudo-ritual.³ Fungsi dan tujuan-tujuan seni pertunjukan tari bersifat ganda terpadu. Di satu pihak dalam rangka ritualisasi, di lain pihak sekulerisasi; di satu pihak dalam rangka melegitimasi serta mengkeramatkan istana dan raja dengan memperlihatkan kebesaran serta keagungan menurut cara-cara tradisi lama, di lain pihak dalam rangka menyebarkan kepada masyarakat dengan cara-cara yang berlaku dalam jamannya.

Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pengembang seni budaya keraton pada khususnya, sampai sekarang tetap dikenal di kalangan masyarakat. Sejak dekade pertama pemerintahannya dengan disibukkan perjuangan gigih melawan Belanda sampai mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian dekade kedua dan ketiga dengan urusan-urusan pemerintahan Republik Indonesia, dan sekarang sibuk dengan urusan-urusan pribadi dalam usia lanjutnya, masih sempat memikirkan bidang kesenian. Akhir-akhir ini Sultan banyak memikirkan serta mempunyai ide-ide mengembangkan bentuk seni tari yang pernah dirintisnya sejak tahun 1941, yaitu Beksan Golek Menak.

³Soedarsono, Seni Pertunjukan Jawa Tradisional dan Pariwisata di D.I.Y (Yogyakarta: Proyek Javanologi, 1986), hal. 319.